



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Tanggamus, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus membuat suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023, IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 ini menjabarkan indikator dan target capaian dari pelaksanaan periode 2013-2018, khususnya target capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus ini disusun sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus ini merupakan alat ukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada periode yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang *Good Governance*, bersih dan akuntabel.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Drs. HAMID HERIANSYAH LUBIS, M.SI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750308 199403 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.1 Indikator Kinerja Utama	6
BAB III PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) atau disebut juga sebagai Indikator kinerja kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.

Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas – asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan dilingkungan Kabupaten Tanggamus Khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai penjabaran dari visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksana kegiatan, sistem dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu.

2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus terdiri atas :

1. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah
2. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tanggamus
3. Nilai LPPD
4. Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang diimplementasi
5. Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi
6. Jumlah penyusunan rancangan produk hukum daerah
7. Jumlah penyelesaian konflik perkara perdata dan tata usaha Negara
8. Jumlah penyusunan rancangan peraturan tentang pemekaran pekon dan kecamatan
9. Jumlah kecamatan yang termonitoring distribusi beras miskin
10. Jumlah pasar yang termonitoring harga sembako
11. Laju pertumbuhan ekonomi
12. Nilai pemahaman pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing
13. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tanggamus
14. Presentase Pemilihan penyediaan Barang/ jasa melalui LPSE
15. Presentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan

Dengan ditetapkannya IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilakukan upaya penerapan yang lebih realistis, untuk kemudian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kebijakan IKU.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus mungkin dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksana program dan kegiatan agar dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan. Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan acuan terhadap pembangunan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Drs. HAMID HERIANSYAH LUBIS, M.SI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750308 199403 1 003



L A M P I R A N

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kinerja aparatur melalui sistem akuntabilitas berbasis kinerja yang akuntabel dan terpercaya.	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	B	B	B	B	B
	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tanggamus	Nilai Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB	B	B	B	BB	BB	BB
	Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi LPPD oleh Kemendagri	B	B	B	B	B	B
Meningkatnya penatausahaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama yang efektif dan efisien.	Persentase kerjasama (MoU,Peraturan Bersama,PKS/Agreement) yang diimplementasi	MoU,Peraturan Bersama,PKS/Agreement yang diimplementasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	$\frac{\text{Jumlah Type OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	70%	70%	75%	75%	80%	80%
	Jumlah penyusunan rancangan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum	20 prd	20 prd	20 prd	20 prd	20 prd	20 prd
	Jumlah penyelesaian konflik perkara perdata dan tata usaha negara	$\frac{\text{Jumlah Konflik yg diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh konflik}} \times 100 \%$	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg
	Jumlah penyusunan rancangan peraturan tentang pemekaran pekon dan kecamatan	Jumlah Rancangan Peraturan yang disusun	2 ranperda	2 ranperda	2 ranperda	2 ranperda	2 ranperda	2 ranperda
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap distribusi program nasional dalam bidang perekonomian yang tepat sasaran.	Jumlah kecamatan yang termonitoring distribusi beras miskin	Jumlah seluruh Kecamatan yang termonitoring	20 kec.	20 kec.	20 kec.	20 kec.	20 kec.	20 kec.
	Jumlah pasar yang termonitoring harga sembako	Jumlah seluruh Pasar yang termonitoring	3 pasar	3 pasar	3 pasar	3 pasar	3 pasar	3 pasar
Meningkatnya daya saing perekonomian dalam pembangunan kabupaten.	Laju pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan rata rata per tahun	6%	6%	6%	6%	6%	6%



Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Nilai pemahaman - pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Jumlah Pengajian Akbar dan pengajian Rutin	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg
Meningkanya kualitas dan akses pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tanggamus	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	70%	75%	75%	80%	80%
	Presentase Pemilihan penyediaan Barang/ jasa melalui LPSE	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Barang/ Jasa}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang/jasa}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan	$\frac{\text{Jumlah Sanggah Banding yg diselesaikan}}{\text{Jumlah sanggah banding}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%